

## Kewenangan Pusat Ditegaskan, Kawi-Kawia Masuk Aset Nasional, Bupati Buton Selatan Muh Adios Percepat Rekomendasi RT/RW



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

JAKARTA-DT Upaya penyelesaian status Pulau Kawi-Kawia menunjukkan perkembangan signifikan setelah pemerintah pusat dan daerah menyepakati konsep cakupan nasional sebagai dasar utama pengelolaan pulau tersebut. Kesepakatan ini mengemuka dalam rangkaian pembahasan yang berlangsung pada 18 dan 20 Februari 2026, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian.

Pembahasan status Kawi-Kawia sebelumnya menjadi polemik antara Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan karena masing-masing memasukkan pulau itu dalam dokumen perencanaan wilayah.

Lanjut ke Hal: 7

## Lilin Diduga Pemicu Kebakaran Kios di Lipu, Kios dan Motor Baru Hangus Terbakar, Pemkot Baubau Gercep Salurkan Bantuan



Laporan: Firman

BAUBAU, BP- Sebuah kios sembako di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, ludes terbakar pada Minggu dini hari (22/02/2026). Kebakaran yang terjadi saat warga masih terlelap itu menimbulkan kerugian besar dan menyebabkan satu orang penjaga kios harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar.

Insiden kebakaran tersebut baru diketahui warga setelah melihat kobaran api yang membesar di bagian depan kios. Kepanikan sempat terja-

di, lantaran api merambat cepat ke barang-barang dagangan yang mudah terbakar.

Laporan resmi diterima oleh layanan emergency call Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Baubau pada pukul 04.50 WITA. Dalam respons cepat, tiga unit armada pemadam dikerahkan menuju lokasi, terdiri dari dua unit mobil Mako Damkar dan satu unit dari Posko Betoambari.

Kepala Dinas Damkar, H La Ode Ali Hasan, SE, M.Si, menyatakan

bahwa petugas tiba di lokasi hanya dalam waktu tujuh menit setelah laporan diterima. "Begitu kendaraan sampai, personel langsung melakukan penyerangan api dari dua titik," ujarnya.

Proses pemadaman berlangsung intens selama sekitar 45 menit karena material kios didominasi sembako, plastik, dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Karakter materi tersebut membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. "Kondi-

Lanjut ke Hal: 7

## Marak Investasi Bodong, OJK Ungkap 25 Ribu Warga Baubau Terlibat Investasi Illegal AMG, Kerugian Berpotensi Capai Rp 125 Miliar



Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Sekitar 25 ribu warga Kota Baubau terdapat menjadi anggota investasi ilegal AMG Pantheon, dengan potensi kerugian mencapai Rp125 miliar. Temuan ini disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara setelah melakukan pendataan awal bersama Satgas PAS-TI.

Fenomena ini kembali menegaskan maraknya praktik investasi bodong di Indonesia, yang sebelumnya pernah terjadi

pada kasus First Travel pada 2017 dan Pandawa Group pada 2016, yang menyebabkan kerugian masyarakat hingga ratusan miliar rupiah. Secara global, kasus serupa pernah mengguncang dunia melalui skandal Bernard Madoff pada 2008 dengan kerugian lebih dari 60 miliar dolar AS.

Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, menjelaskan bahwa jumlah anggota AMG secara nasional diperkirakan mencapai 200 ribu orang.

"Proses pendataan masih berjalan. Temuan ini bisa terus bertambah karena jaringan AMG tersebar di berbagai daerah," ujarnya.

Menurut Bismi, korban investasi AMG berasal dari berbagai profesi, mulai dari ASN, TNI-Polri, tenaga pendidik, akademisi, pelajar, hingga petani dan nelayan. Ia mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat tertarik karena tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat. "Bahkan ada yang baru menerima pesangon PHK

Lanjut ke Hal: 7

## Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Serukan Toleransi Warung Makan dan Jaga Lingkungan Selama Ramadan 1447 H



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP - Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan daerah yang berangkat dari aspirasi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers usai pelak-

sanaan forum konsultasi publik rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Baubau tahun 2027.

Pada sesi tersebut, ia menuturkan bahwa seluruh pembahasan dalam forum merupakan tindak lanjut dari usulan

berjenjang masyarakat mulai tingkat kelurahan, kecamatan, hingga forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia menekankan bahwa proses perencanaan pembangunan harus

Lanjut ke Hal: 7

## Kewenangan Pusat Ditegaskan, Kawi-Kawia Masuk Aset Nasional, Bupati Buton Selatan Muh Adios Percepat Rekomendasi RT/RW

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum demi mencegah sengketa batas administrasi dan implikasi keuangan daerah. Dalam pertemuan lanjutan pada 20 Februari 2026, seluruh pihak menyetujui bahwa Pulau Kawi-Kawia termasuk dalam kategori cakupan nasional, sehingga secara prinsip berada sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah pusat. Draf kesepakatan ini disusun untuk memastikan pulau tersebut tidak dimiliki oleh salah satu daerah, melainkan dikelola sebagai aset negara.

"Konsep cakupan nasional ini menjadi titik temu agar tidak muncul klaim sepihak dari daerah mana pun. Pemerintah pusat hadir untuk memastikan stabilitas dan kepastian hukum," ujar Mendagri dalam pernyataan resminya.

Meski berstatus aset nasional, pemerintah daerah tetap diberikan ruang untuk mencantumkan Pulau Kawi-Kawia dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kabupaten Buton Se-

latan, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kabupaten Kepulauan Selayar, tetap dapat memanfaatkan data spasial pulau tersebut dalam penyusunan kebijakan wilayah.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyatakan dukungannya terhadap keputusan tersebut. "Yang terpenting adalah kepastian aturan. Dengan status nasional, kami dapat menyesuaikan RTRW tanpa menimbulkan sengketa," ujarnya dalam forum pembahasan.

Dalam proses pembahasan, Badan Informasi Geospasial (BIG) memberikan masukan teknis, terutama mengenai aturan satu pulau satu nama dalam sistem geospasial nasional. BIG menegaskan bahwa penetapan nama dan batas pulau harus mengacu pada regulasi nasional agar tidak menimbulkan kerancuan data di kemudian hari.

Selain itu, Kemendagri juga menyoroti kaitan status batas wilayah dengan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Penegasan batas administratif menjadi penting karena

berpengaruh terhadap perhitungan pendapatan daerah, sehingga memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Secara historis, polemik antarwilayah terkait batas pulau bukan hal baru di Indonesia. Pemerintah pernah menangani kasus serupa, seperti penetapan batas Pulau Berhala antara Jambi dan Kepulauan Riau yang baru selesai pada 2012. Secara global, beberapa negara juga menghadapi situasi serupa, seperti sengketa Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2002 berdasarkan prinsip administrasi efektif (effective occupation).

Konsep pengelolaan bersama yang diadopsi dalam kesepakatan Pulau Kawi-Kawia disebut sebagai bentuk solusi konstruktif. Model ini pernah diterapkan pada beberapa wilayah strategis di dunia, seperti joint development area di Laut China Selatan dan kawasan perbatasan Thailand-Malaysia, yang memunculkan dua wilayah

tetap mengelola area tertentu tanpa mengubah batas kedaulatan.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa keputusan ini penting untuk menjaga keharmonisan antarwilayah. "Selama regulasinya jelas, kami siap mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat," ucapnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, kesepakatan ini membuka jalan bagi percepatan pembahasan RTRW provinsi dan kabupaten yang sebelumnya tertunda. Pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk mengikuti fasilitasi pemerintah pusat secara konstitusional dan transparan.

Dengan adanya kesepakatan lintas daerah dan pemerintah pusat, proses finalisasi draf kesepakatan diperkirakan menjadi lebih cepat. Tahapan selanjutnya akan diarahkan pada penetapan formal melalui peraturan yang mengikat guna memastikan pengelolaan Pulau Kawi-Kawia berjalan sesuai kepentingan nasional. (\*)

## Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Serukan Toleransi Warung Makan dan Jaga Lingkungan Selama Ramadan 1447 H

tetap mengedepankan kebutuhan riil masyarakat.

"Apa yang kita bicarakan hari ini adalah hilir dari aspirasi masyarakat di Musrenbang. Saya berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa bekerja bersama, bersinergi untuk merealisasikan program-program yang telah disusun agar tepat sasaran," ujarnya.

Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Wali Kota turut menyoroti aspek keamanan dan ketertiban wilayah. Ia meminta masyarakat untuk lebih waspada menjaga lingkungan, khususnya saat meninggalkan rumah untuk melaksanakan salat tarawih di masjid. Warga diimbau memastikan rumah terkunci dan aman sebelum beraktivitas ibadah malam.

Tidak hanya itu, ia juga menekankan komitmen pemerintah kota dalam menekan

angka balapan liar dan potensi tawuran remaja yang sering terjadi pada awal Ramadan. "Kita tidak ingin ada kekacauan yang mengganggu kekhayalan ibadah. Peran orang tua sangat penting di sini," tegasnya.

Dalam upaya menjaga stabilitas selama Ramadan, Sekretaris Daerah Kota Baubau disebut telah menyiapkan Surat Edaran yang akan segera ditandatangani Wali Kota. Instruksi ini mewajibkan camat, lurah, hingga RT/RW turun langsung memastikan ketertiban di wilayah masing-masing.

Sementara itu, terkait keberadaan warung makan pada siang hari selama Ramadan, pemerintah kota tidak memberlakukan penutupan. Namun, Wali Kota mengimbau agar seluruh pelaku usaha tetap menjaga toleransi dan mengatur tampilan usahanya agar tidak terlalu men-

colok dari depan.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga menindaklanjuti instruksi Presiden mengenai Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Ia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam menjaga kebersihan dan mengurangi sampah.

Fokus gerakan tersebut antara lain membenahi keasrian kota melalui pengelolaan sampah yang lebih baik serta penataan estetika kota. Salah satu langkah yang disoroti adalah penertiban baliho kedaluwarsa atau tidak layak yang berpotensi mengganggu kerapian visual kota.

Dengan berbagai penekanan tersebut, pemerintah Kota Baubau berharap terwujudnya pembangunan yang lebih responsif, lingkungan yang lebih bersih, serta situasi yang kondusif selama Ramadan dan seterusnya. (\*)

## Marak Investasi Bodong, OJK Ungkap 25 Ribu Warga Baubau Terlibat Investasi Illegal AMG, Kerugian Berpotensi Capai Rp 125 Miliar

lalu tergiur untuk ikut," kata dia.

Sementara itu, potensi kerugian Rp125 miliar dihitung berdasarkan estimasi rata-rata setoran Rp5,2 juta per anggota. Bismi menegaskan bahwa nominal tersebut masih perkiraan awal. "Kalau dihitung mendalam, nilainya bisa lebih besar karena ada anggota yang menyeter berkali-kali," ujarnya menambahkan.

OJK bersama Satgas PASTI kini menempuh langkah investigasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Fokus utama ialah menelusuri aliran dana dan mengidentifikasi pihak-pihak yang berperan sebagai pengendali utama jaringan AMG. Penelusuran dilakukan dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum.

Selain investigasi perbankan, OJK juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir situs

dan tautan yang terkait aktivitas AMG. Langkah ini diambil karena platform digital menjadi medium utama penyebaran skema investasi tersebut.

Sejumlah rekening yang terindikasi digunakan untuk menampung dana masyarakat kini dalam tahap pelacakan. Menurut OJK, pihak yang beroperasi di daerah hanya bagian dari sistem berlapis yang dikoordinasikan oleh pelaku di tingkat atas. "Kami melihat ada struktur yang lebih besar dan masih harus diungkap," tegas Bismi.

Mengenai kemungkinan pengembalian dana, OJK menyatakan belum dapat memastikan hasilnya. Keberhasilan Refund sangat bergantung pada penelusuran aset dan kemampuan aparat dalam menyita kekayaan pelaku. "Harapan itu masih ada, dan kami akan mengejar setiap aset yang memungkinkan untuk meminimalkan kerugian masyarakat," kata Bismi.

Wali Kota H.

Yusran Fahim ikut menyoroti maraknya investasi ilegal di daerahnya. Ia menilai bahwa rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab masyarakat rentan tertipu. "Bisnis ilegal seperti AMG sangat meresahkan dan tidak bisa dibiarkan," tegasnya.

Ia juga menginstruksikan camat, lurah, dan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sosialisasi mengenai investasi legal dan pengelolaan keuangan yang sehat. Menurutnya, ASN harus menjadi contoh dalam menerapkan prinsip kehati-hatian agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan.

Pemerintah Kota Baubau berharap melalui kegiatan edukasi keuangan yang rutin digelar, kasus serupa tidak terulang pada masa mendatang. Langkah ini dianggap penting mengingat investasi ilegal telah menjadi pola yang berulang baik di Indonesia maupun di banyak negara lainnya. (\*)

## Lilin Diduga Pemicu Kebakaran Kios di Lipu, Kios dan Motor Baru Hangus Terbakar, Pemkot Baubau Gercep Salurkan Bantuan

si di lapangan cukup menantang karena api sudah menyambar ke bagian rumah belakang," tambah Ali Hasan.

Meski penyebab pasti masih diselidiki, dugaan sementara berdasarkan keterangan warga menyebutkan bahwa sumber api berasal dari lilin yang dinyalakan sebagai penerangan. Penggunaan lilin dalam ruangan yang terdapat banyak bahan mudah terbakar menjadi faktor yang mempercepat merambatnya api.

Dampak kerusakan yang ditimbulkan cukup besar. Kios berukuran 4x3 meter itu hangus terbakar, sebuah sepeda motor baru rusak total, dan bagian depan rumah pemilik kios ikut terdampak. Total kerugian materiil

diperkirakan mencapai Rp100 juta.

Penjaga kios bernama Wa Rima, seorang nenek yang juga merupakan kerabat dari pemilik kios La Daadu (40), mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan barang dagangan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Faga Husada. "Kondisinya butuh perawatan intensif karena luka bakarnya cukup serius," kata seorang petugas medis.

Wali Kota Baubau, H Yusran Fahim, SE, turut meninjau lokasi kebakaran beberapa jam setelah kejadian. Pemerintah Kota Baubau juga menyerahkan bantuan sosial berupa logistik pangan, pa-

kaian, selimut, sarung, dan peralatan dapur melalui Sekda La Ode Darus Salam, S.Sos, M.Si, bersama jajaran OPD terkait.

Secara historis, kasus kebakaran kios seperti ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 2.300 kasus kebakaran permukiman terjadi sepanjang 2024, dengan sebagian besar disebabkan oleh hubungan arus pendek dan penggunaan alat penerangan manual seperti lilin. Di tingkat global, laporan UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) mencatat bahwa kebakaran

kecil di area padat penduduk adalah salah satu penyebab kerugian ekonomi terbesar di negara berkembang.

Ali Hasan kembali mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api. "Kami mengimbau agar masyarakat tidak menyalakan lilin di area yang banyak material mudah terbakar. Keselamatan harus menjadi prioritas," tegasnya.

Upaya edukasi dan mitigasi kebakaran, termasuk simulasi penanggulangan kebakaran skala kecil, disebut akan terus dilakukan oleh Damkar Baubau sebagai bagian dari program pencegahan jangka panjang. (\*)

## Nusron Wahid Tekankan Sanad Keilmuan sebagai Etika Kepemimpinan di Kajian Tarawih UI



Laporan: Ardi

DEPOK, DT -Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah pada Senin (23/02/2026) menghadirkan bahasan mendalam mengenai sanad keilmuan dan etika kepemimpinan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Di hadapan alumni serta jemaah Ramadan Universitas Indonesia, Nusron menegaskan bahwa pijakan ilmu merupakan fondasi moral dalam pengambilan kebijakan publik.

Sebagai pembicara utama, Nusron membuka kajian dengan mengingatkan kembali tradisi sanad yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah keilmuan Islam sejak abad ke-8. Tradisi tersebut menekankan keabsahan sumber ilmu melalui rantai transmisi yang terjaga. Ia mengutip pandangan ulama klasik yang menyebut, "Negara bisa runtuh bukan karena hilangnya simbol-simbol formal, tetapi ketika keadilan tidak lagi menjadi landasan."

Konteks historis itu, menurut Nusron, relevan dengan tata kelola negara masa kini. Ia menjelaskan bahwa pemerintahan modern juga memerlukan mekanisme kontrol pengetahuan, sebagaimana ilmu agama dijaga oleh

sanad. "Jika dalam agama ada sanad, maka dalam kebijakan publik ada data, regulasi, dan norma hukum sebagai penjaga," ujarnya.

Nusron juga menambakan bahwa sejarah internasional telah menunjukkan pentingnya regulasi berbasis data. Ia mencontohkan era pasca-Revolusi Industri di Eropa, ketika negara-negara maju memperkuat kebijakan berbasis statistik untuk menghindari kekacauan sosial yang muncul akibat industrialisasi cepat. "Negara yang mengabaikan data akhirnya membuat kebijakan yang bersifat uji coba dan merugikan rakyatnya," katanya.

Di tingkat nasional, ia menyinggung pengalaman Indonesia pada periode awal reformasi ketika lemahnya basis data pertanahan memperburuk sengketa lahan. Menurutnya, perubahan besar terjadi ketika pemerintah mulai membangun sistem modernisasi informasi pertanahan. "Sejak itu kita belajar bahwa kebijakan yang tidak memiliki fondasi data akan mudah dipelintir kepentingan," kata Nusron.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya berkutat pada aspek teknis, tetapi juga moralitas seorang pemegang amanah. Ia mengingatkan

bahwa dalam diri manusia ada kecenderungan merasa paling benar dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi. "Karena itu, seorang pemimpin harus memiliki rem moral agar tidak tergelincir," ujarnya.

Dalam bagian lain ceramahnya, Nusron mengutip doa Rasulullah SAW yang menjadi peringatan bagi pejabat publik. "Siapa yang mempersulit hidup rakyat, maka Allah akan mempersulit hidupnya. Dan siapa yang memudahkan urusan rakyat, hidupnya akan dimudahkan," ucapnya dalam kutipan langsung.

Terkait tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Nusron merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Prinsip tersebut, katanya, tercermin dalam arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan sumber daya.

Program redistribusi tanah, penataan Hak Guna Usaha (HGU), dan penyusunan tata ruang nasional disebutnya sebagai langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan struktural. Menurutnya, reformasi agraria tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga

menjadi instrumen pemerataan sosial. "Kebijakan ini agar manfaat tanah dan ruang tidak hanya dinikmati segelintir pihak," katanya menegaskan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti kajian para pemikir klasik seperti Ibn Khaldun yang menyatakan bahwa keadilan merupakan penopang utama keberlangsungan negara. Ia menyebut pandangan historis itu masih relevan untuk mengingatkan para pemimpin masa kini agar tidak terperangkap dalam simbol kekuasaan semata.

Menutup kajian, Nusron mengajak mahasiswa dan alumni UI untuk memandang kepemimpinan sebagai tanggung jawab jangka panjang. Ia menegaskan bahwa generasi muda harus memadukan kompetensi profesional dengan integritas agar kebijakan publik tetap berpihak pada nilai keadilan. "Negara akan bertahan ketika keadilan hidup, bukan ketika gelar dan simbol dipertahankan," ujar Nusron.

Kajian Tarawih ini sekaligus menjadi ruang penguatan nilai-nilai etis bagi peserta untuk mengembangkan kepemimpinan berperspektif ilmu dan kemaslahatan publik. (\*)

## MK Digugat, Pembatasan Keluarga Presiden untuk Pilpres Kembali Menguat



Ilustrasi. UU Pemilu Digugat, MK Diminta Larang Keluarga Presiden Maju Pilpres.

Laporan: Alwan

J A K A R T A , BP-Perdebatan mengenai batasan pencalonan presiden dan wakil presiden kembali mencuat setelah dua advokat mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut menyoroti ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan menuntut larangan bagi keluarga Presiden ataupun Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).

Gugatan itu diajukan oleh Raden Nuh dan Dian Amalia, dan terdaftar sebagai perkara Nomor 81/PUU-XXIV/2026 pada Selasa (24/6). Keduanya menganggap aturan yang berlaku saat ini membuka peluang ketidaksetaraan dalam kontestasi elektoral.

Dalam permohonannya, para pemohon menegaskan perlunya batasan tegas untuk mencegah konflik kepentingan. "Ada potensi penyalahgunaan kekuasaan ketika anggota keluarga pejabat aktif ikut berkontestasi," tulis mereka dalam berkas permohonan.

Para penggugat meminta MK menafsirkan Pasal 169 UU Pemilu sebagai ketentuan yang mewajibkan pendaftar capres maupun cawapres bebas dari hubungan darah, hubungan semenda, ataupun kedekatan keluarga dengan Presiden maupun Wakil Presiden yang sedang menjabat.

Pasal 169 UU Pemilu sendiri mengatur syarat-syarat pencalonan, seperti berstatus WNI, beru-

sia minimal 40 tahun atau pernah menduduki jabatan elektoral, sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal SMA, serta tidak pernah dipidana melalui putusan berkekuatan hukum tetap.

Namun menurut pemohon, absennya pembatasan hubungan keluarga membuat pasal tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan kekuasaan. "Ketika tidak ada batasan, maka persaingan politik menjadi tidak sehat dan tidak setara," ujar pemohon dalam salah satu kutipannya.

Mereka juga menyebut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan kekuasaan harus dibatasi. Pemohon menilai, pembatasan pencalonan adalah bagian dari mekanisme kontrol agar jabatan presiden tidak berada dalam lingkaran kekuasaan yang terpusat.

Secara historis, isu pembatasan keluarga penguasa bukan hal baru, baik di Indonesia maupun di dunia. Pada masa Orde Baru, wacana mengenai nepotisme menguat karena sejumlah posisi strategis diisi kerabat dekat Suharto. Sementara secara internasional, beberapa negara seperti Filipina dan Korea Selatan terus berjuang menekan dominasi politik dinasti dalam sistem pemilu mereka.

Isu nepotisme juga pernah menjadi sorotan global ketika pemerintahan di Amerika Serikat mengatur larangan anggota keluarga

Presiden menjabat posisi tertentu dalam pemerintahan federal melalui Anti-Nepotism Law of 1967, yang menjadi contoh pembatasan konflik kepentingan di negara demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai politik dinasti kembali mengemuka setelah sejumlah anggota keluarga pejabat aktif maju dalam pemilihan kepala daerah, sehingga gugatan ini dipandang sebagai upaya menata ulang sistem pencalonan di tingkat nasional.

Pemohon juga menegaskan, "Nepotisme itu muncul ketika seseorang menggunakan jabatan publik untuk keuntungan keluarga. Itu yang harus dicegah dalam pemilu." Kutipan ini menegaskan inti kekhawatiran mereka terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Hingga kini, MK masih menjadwalkan pemeriksaan pemeriksaan awal dan akan mempelajari seluruh dalil yang disampaikan pemohon. Proses persidangan lanjutan akan menentukan apakah aturan pencalonan presiden akan kembali mengalami perubahan signifikan seperti putusan-putusan MK sebelumnya yang kerap mempengaruhi desain pemilu nasional.

Jika MK mengabulkan gugatan tersebut, maka Pilpres mendatang berpotensi memiliki aturan baru yang secara langsung membatasi ruang gerak keluarga pejabat aktif dalam mengikuti kontestasi nasional. (\*)

## Gubernur Sultra ASR Siapkan 7.800 Tiket Gratis dan Perketat Pengawasan untuk Mudik 2026



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2026 dengan menyediakan 7.800 tiket kapal gratis dan memperketat pengawasan keselamatan melalui ramp check di berbagai simpul transportasi. Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran perjalanan masyarakat yang diprediksi meningkat signifikan pada Idulfitri 1447 H.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengantisipasi lonjakan mobilitas mudik Lebaran 2026 dengan memperluas layanan keselamatan transportasi dan menyediakan ribuan tiket gratis bagi warga kepulauan. Kebijakan tersebut menjadi fokus utama Pemprov Sultra menjelang puncak arus mudik April mendatang.

Sebagai bagian dari persiapan, Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Muhammad Rajulan, memastikan bahwa pelaksanaan ramp check kembali dilanjutkan pada 26 Februari 2026 di Terminal Baruga, Kendari. Lokasi ini dipilih sebagai titik pemeriksaan lanjutan setelah kegiatan serupa digelar di Terminal Tipe A Puuwatu sehari sebelumnya. "Kami ingin memastikan seluruh armada benar-benar laik jalan sebelum volume penumpang meningkat," ujarnya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kendaraan

memenuhi standar teknis dan administratif, termasuk sistem rem, kondisi ban, lampu penerangan, kelistrikan, dan keberadaan perlengkapan keselamatan. Ramp check juga mengevaluasi dokumen kendaraan seperti STNK, uji KIR, dan kartu pengawasan.

Selain ramp check, kesiapan pengemudi juga menjadi perhatian penting. Petugas memastikan pengemudi memiliki SIM sesuai golongan serta berada dalam kondisi sehat secara fisik dan mental. Hal ini dinilai krusial mengingat tingginya risiko kecelakaan selama periode mudik.

Dukungan lintas sektor turut mendorong efektivitas kegiatan pengawasan. Unsur kepolisian dari Polda Sultra dan PT Jasa Raharja dilibatkan untuk menguatkan aspek penegakan hukum sekaligus menjamin perlindungan bagi penumpang. Kolaborasi ini sejalan dengan standar keselamatan nasional yang telah dijalankan sejak program angkutan Lebaran pertama kali digelar pemerintah Indonesia pada dekade 1970-an.

Di sisi layanan laut, Pemprov Sultra kembali mengaktifkan program tiket mudik gratis dengan total kuota 7.800 penumpang untuk rute Kendari-Raha (PP) dan Kendari-Baubau (PP). Program ini telah disetujui oleh Kementerian Perhubungan RI setelah sebelumnya diusulkan oleh Gubernur

Sultra Andi Sumanterukka.

Rajulan menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari program serupa yang dimulai pada Lebaran 2025. "Program ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut," katanya dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Pelaksanaan rute mudik gratis didukung oleh sejumlah kapal cepat, antara lain KM Express Bahari 6E, KM Express Bahari 5E, KM Express Cantika 168, dan KM Express Priscilia 88. Armada tersebut merupakan kapal komersial yang telah lama melayani jalur antarpulau di Sulawesi Tenggara.

Program tiket gratis ini bertujuan mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus menjaga keterjangkauan layanan transportasi. Kebijakan serupa telah diberlakukan di sejumlah negara kepulauan lain, seperti Filipina dan Jepang, yang menyediakan subsidi transportasi selama musim liburan untuk menjaga stabilitas mobilitas nasional.

Menurut Pemprov Sultra, penyelenggaraan mudik tahun ini berpotensi meningkat karena bertepatan dengan perbaikan ekonomi regional serta pulihnya aktivitas pariwisata pas-

capandemi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas di lapangan.

Dalam pelaksanaan ramp check, koordinasi antara Pemprov Sultra, instansi vertikal Kementerian Perhubungan, serta pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat. Dishub Sultra juga mengimbau operator angkutan umum untuk mendukung kegiatan menyiapkan armada dan seluruh dokumen pendukung.

"Kami berharap operator dapat memahami bahwa keselamatan penumpang adalah prioritas utama. Tanpa dukungan operator, upaya menciptakan transportasi yang aman akan sulit dicapai," ujar Rajulan menegaskan.

Masyarakat pun diimbau memilih angkutan resmi dan melaporkan kendaraan yang dianggap tidak memenuhi standar. Peran aktif publik, menurut Pemprov Sultra, menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan, sebagaimana yang diterapkan dalam kebijakan transportasi publik berbagai negara maju.

Dengan kombinasi tiket gratis, pengawasan ketat, dan dukungan lintas sektor, Pemprov Sultra menargetkan pelaksanaan mudik 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan minim insiden. (\*)

## Kultum di Al Kautsar, Wagub Sultra Hugua Ajak Warga Jadikan Ramadan Momentum Perbaikan Diri



Laporan: Mashuri

SULTRA:BP- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua mengajak umat Islam menjadikan Ramadan sebagai ruang memperbaiki kualitas diri dan memperkuat hubungan sosial. Seruan itu ia sampaikan saat menyampaikan kultum usai salat tarawih di Masjid Raya Al Kautsar, Kendari, Selasa (24/2/2026) malam.

Pada kesempatan itu, Hugua menekankan bahwa Ramadan bukan hanya ritual ibadah, melainkan momentum memperkuat fondasi moral masyarakat. Ia menyebutkan bahwa puasa menjadi sarana membangun karakter yang sabar, jujur, dan peduli terhadap sesama.

Menurutnya, masyarakat modern menghadapi tantangan besar berupa pola hidup kompetitif dan materialistis. Karena itu, Ramadan dianggap sebagai waktu tepat mengembalikan keseimbangan hidup antara kebutuhan spiritual dan sosial.

"Ramadan mengajarkan kita menata kembali prioritas hidup. Bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi bagaimana menjaga perilaku dan perasaan," ujar Hugua dalam salah satu bagian kultumnya.

Ia menambahkan bahwa nilai empati harus tumbuh kuat selama bulan suci. Pengendalian emosi, menurutnya, merupakan inti dari

praktik puasa dan kunci dalam membangun keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat.

Hugua juga menyoroti pentingnya solidaritas sosial, terutama di tengah meningkatnya dinamika sosial dan ekonomi. Ia mendorong warga untuk meningkatkan kepedulian, memperbanyak kegiatan berbagi, dan memperkuat tali silaturahmi antarkelompok.

"Ketika kita peduli pada sesama, pembangunan daerah akan berjalan lebih baik. Solidaritas itu fondasi kuat untuk kemajuan," tegasnya.

Selain ajakan spiritual dan sosial, Hugua menyisipkan pandangan historis tentang praktik puasa dalam tradisi Islam. Ia mengingatkan bahwa sejak masa Nabi Muhammad SAW, Ramadan menjadi momen persatuan umat. "Sebuah nilai yang tetap relevan hingga kini. Di tingkat global, beberapa negara seperti Mesir, Turki, dan Arab Saudi juga memanfaatkan Ramadan sebagai momen penguatan nilai kebersamaan dan stabilitas sosial.

Di Indonesia, nilai solidaritas Ramadan telah menjadi bagian penting tradisi masyarakat sejak era awal kemerdekaan. Kegiatan berbagi dan gotong royong kerap berkembang pesat selama bulan suci, termasuk melalui program pemerintah, lembaga sosial, dan inisiatif warga.

Hugua menilai bahwa akar tradisi tersebut perlu terus diperkuat agar dapat mendukung pembangunan karakter bangsa. Ia menyebut bahwa kualitas moral masyarakat merupakan indikator penting dalam keberhasilan pembangunan daerah dan nasional.

"Ada banyak cara memperkuat Ramadan, salah satunya melalui aksi nyata di lingkungan terdekat. Kebaikan itu akan tumbuh jika kita memulainya dari diri sendiri," katanya.

Ia berharap kegiatan keagamaan selama Ramadan di Sulawesi Tenggara tidak hanya memperkaya spiritualitas, tetapi juga memperkuat rasa persatuan warga. Menurutnya, harmoni sosial menjadi modal utama menciptakan masyarakat yang religius dan sejahtera.

Hugua menutup kultumnya dengan ajakan agar nilai-nilai Ramadan terus dijaga meskipun bulan suci telah berlalu. Ia menegaskan bahwa pengendalian diri, keikhlasan, dan kepedulian adalah prinsip universal yang sejalan dengan pembangunan sosial.

Dengan seruan tersebut, pemerintah daerah berharap para jemaah dapat membawa semangat Ramadan ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan lingkungan yang rukun, saling menghargai, dan penuh kebajikan. (\*)

## Kebersihan Disorot, Bupati Buton Alvin Akawijaya Pantau Sampah di Kawasan Rujab



**Pewarta: La Harman**

BUTON, BP - Komitmen Pemerintah Kabupaten Buton dalam menjaga kebersihan kembali ditekan melalui peninjauan lapangan yang dilakukan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, di sejumlah titik strategis di kawasan Pasarwajo. Kegiatan tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Forkopimda se-Indonesia terkait peningkatan kebersihan dan tata kelola lingkungan.

Peninjauan dimulai dari kawasan belakang rumah jabatan (rujab) Bupati yang selama ini menjadi lokasi penampungan sampah sementara. Di area tersebut, Bupati menemukan tumpukan sampah yang tidak tertata dan berpotensi mengganggu estetika kawasan pemerintahan. Temuan itu menjadi perhatian utama karena lokasinya berada di jantung pusat pemerintahan Kabupaten Buton.

Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. "Kebersihan adalah tanggung jawab kita

bersama. Pemerintah akan mengawasi, tetapi masyarakat juga harus ikut menjaga," ujarnya saat berbicara kepada perangkat daerah yang mendampinginya.

Selain mengevaluasi titik penampungan sampah sementara, Bupati juga meninjau kondisi kebersihan di sekitar Tugu Aspal, salah satu ikon publik Kabupaten Buton yang kerap dikunjungi masyarakat. Ia memastikan area tersebut tetap representatif sebagai ruang publik yang mencerminkan wajah ibu kota kabupaten.

Dalam tinjauan itu, Bupati memerintahkan instansi terkait agar meningkatkan pengawasan rutin. Ia menilai bahwa langkah penanganan cepat diperlukan sebelum tumpukan sampah mengganggu aktivitas warga. "Saya ingin setiap laporan yang masuk segera ditindaklanjuti. Jangan menunggu lama untuk bekerja," tegasnya.

Sejumlah kepala dinas turut mendampingi peninjauan tersebut, termasuk pejabat dari sektor kebersihan, lingkungan hidup, dan prasarana wilayah. Kolaborasi lintas perangkat daerah ini dianggap pent-

ing agar kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Pasarwajo juga hadir dalam kegiatan tersebut untuk memastikan koordinasi di lingkup kecamatan berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa pihak kecamatan siap menjalankannya instruksi Bupati, terutama dalam hal pembinaan masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memastikan kebersihan kawasan, tetapi juga memperkuat edukasi publik tentang pentingnya pengelolaan lingkungan. Dalam sejarah penanganan sampah nasional, Indonesia pernah menghadapi tragedi longsor sampah di Leuwigajah, Jawa Barat, pada 2005 yang menelan ratusan korban jiwa. Kejadian itu menjadi pengingat bahwa tata kelola sampah tidak dapat dipandang sebelah mata.

Secara global, pengelolaan sampah juga menjadi isu penting, terutama setelah laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) pada 2023 menunjukkan bahwa sampah dunia meningkat 70 persen dalam dua dekade terakhir. Fenomena itu menuntut setiap pemerintah daerah

untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah demi mencegah dampak ekologis yang lebih besar.

Dalam konteks lokal, upaya peninjauan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buton menjadi bagian dari strategi mitigasi dini terhadap potensi permasalahan lingkungan. Kebersihan ruang publik dinilai sebagai indikator penting dalam menciptakan lingkungan kota yang sehat dan layak huni.

Dengan langkah yang lebih sistematis, pemerintah berharap kesadaran masyarakat turut meningkat seiring dengan penguatan regulasi dan pemantauan lapangan. Pemerintah Kabupaten Buton menargetkan kawasan Pasarwajo menjadi contoh wilayah dengan pengelolaan lingkungan yang tertib dan berkelanjutan.

Peninjauan ini diharapkan memberi dorongan bagi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan. "Kami akan terus hadir di lapangan, tetapi keberhasilan menjaga kebersihan ada di tangan kita semua," pungkas Bupati. (\*)

## Azhari Buka Forum RKPD 2027, Tekankan Reformasi dan Penguatan PAD Daerah



**Laporan: Ardi**

BUTENG, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) 2027 di Lakudo pada Senin (23/2/2026), sebagai langkah awal menentukan prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Bupati Buton Tengah, Azhari, dan dihadiri perwakilan dari BPS Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, camat, kepala desa, serta organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut menjadi bagian krusial dalam penyusunan RKPD sebelum penyusunan rancangan akhir.

Dalam forum itu, Azhari mengingatkan pentingnya disiplin dalam perencanaan pembangunan. Ia menegaskan bahwa tahun 2027 menuntut kebijakan yang lebih adaptif. "Pembangunan tidak boleh hanya mengikuti rutinitas. Kita harus berpikir inovatif dan realistis," ujarnya.

Sejumlah peserta memberikan masukan terhadap rencana prioritas daerah, terutama sektor ekonomi unggulan. Pemerintah daerah menilai bahwa penyusunan Ranwal RKPD bukan hanya formalitas, tetapi platform untuk merumuskan arah kebijakan yang terukur dan berbasis data.

Keterbatasan ruang fiskal menjadi fokus pembahasan. Bupati Azhari menyebut perlunya langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Penguatan investasi dan optimalisasi PAD adalah kunci agar Bu-

ton Tengah tetap bertumbuh," katanya menegaskan.

Pemerintah daerah menargetkan sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi 2027. Komoditas seperti lobster, ikan teri, rajungan, dan rumput laut disebut memiliki nilai jual tinggi dan potensial menarik investor. Upaya ini sejalan dengan sejarah nasional, di mana sektor kelautan menjadi salah satu penopang ekspor Indonesia sejak era Orde Baru.

Selain sektor perikanan, peningkatan pariwisata juga masuk dalam rencana prioritas. Pembenahan destinasi wisata diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru di wilayah kepulauan tersebut. Hal ini merujuk pada tren global, di mana sektor pariwisata internasional pasca-pandemi kembali tumbuh pesat berdasarkan catatan World Tourism Organization (UNWTO).

Di forum tersebut, Azhari memaparkan bahwa meski anggaran efisien, Pemkab Buton Tengah berhasil mendorong masuknya sejumlah program pusat dengan nilai mencapai sekitar Rp500 miliar. Proyek tersebut meliputi pembangunan RSUD baru, markas batalyon, kantor BPS, gudang Bulog, hingga Sekolah Rakyat dan Pengadil Agama.

Untuk mendukung sektor maritim, Pemkab bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam pengembangan lahan tambak udang seluas sekitar 400 hektare. Lang-

kah ini mengikuti tren global industri udang yang dalam dua dekade terakhir menjadi salah satu komoditas dengan permintaan tertinggi di pasar Asia dan Eropa.

Selain maritim, pemerintah mengarahkan kawasan pesisir sebagai sentra komoditas bernilai ekonomi tinggi. Sementara itu, area eks-Benteng ditetapkan sebagai kawasan pertanian yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan lokal.

Di sektor pendidikan, pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui kerja sama dengan Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Azhari berharap kampus tersebut dapat berkembang menjadi institut mandiri. "Pendidikan harus menjadi fondasi. Tanpa SDM yang kuat, kita sulit melangkah," tegasnya.

Penataan tenaga PPPK juga ikut dibahas sebagai bagian dari strategi peningkatan layanan publik. Pemerintah memastikan distribusi pegawai dilakukan secara proporsional agar tidak membebani keuangan daerah, namun tetap mendukung kebutuhan pelayanan masyarakat.

Menutup forum, Bupati Azhari menekankan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia berharap Forum Ranwal RKPD menjadi ruang menghidupkan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyempurnaan dokumen RKPD 2027 yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah. (\*)

## Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Sebut Pembangunan Sekolah Rakyat Baubau Siap Dimulai, Tender Ditarget April 2026



### Laporan: Firman

BAUBAU, DT - Pemerintah Kota Baubau terus mempercepat agenda pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas pemerataan akses pendidikan. Program ini ditargetkan mulai dikerjakan Agustus 2026 setelah proses tender digelar pada April mendatang.

Rencana pembangunan tersebut kembali ditegaskan oleh Wali Kota Yusran Fahim yang menyebutkan bahwa tahap paling krusial yang kini tersisa ialah penyelidikan tanah. Sementara itu, pembangunan akses jalan menuju lokasi telah rampung.

Dalam wawancaranya, Yusran menjelaskan bahwa seluruh proses diarahkan untuk memastikan pembangunan dapat dimulai tepat waktu. "Insya Allah, April sudah masuk tahap tender dan Agustus sudah mulai pelaksanaan pembangunan," ujarnya, Senin (23/2/2026).

Pemerintah Kota Baubau juga menyiapkan langkah antisi-

patif apabila pembangunan belum selesai pada awal tahun ajaran. Menurut Yusran, pemerintah siap memanfaatkan fasilitas pemerintah sebagai sekolah transisi demi menjamin kegiatan belajar tetap berjalan. "Kita tidak ingin siswa tertunda masuk sekolah. Fasilitas pemerintah siap dipakai sementara," katanya.

Sebelumnya, pembahasan internal pemerintah lebih banyak fokus pada legalitas dan status lahan. Pemkot memastikan seluruh dokumen sertifikat akan segera diselesaikan dan diserahkan agar tidak menghambat proses pembangunan.

Selain kesiapan konstruksi, pemerintah juga menata persiapan teknis lainnya seperti perencanaan jumlah peserta didik serta koordinasi dengan instansi pendidikan terkait. Tahap awal akan difokuskan pada pembukaan jenjang Sekolah Dasar (SD) untuk siswa kelas satu, sementara pengembangan ke jenjang Sekolah Menengah

Pertama (SMP) akan disesuaikan dengan evaluasi tahap awal.

Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi strategi Baubau dalam memperbaiki pemerataan pendidikan. Konsep ini mengingatkan publik pada model sekolah rakyat pada masa perjuangan nasional, seperti inisiatif pendidikan kerakyatan yang berkembang pada awal abad ke-20, termasuk Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 1922. Model pendidikan serupa juga hadir di beberapa negara berkembang, seperti People School Movement di India yang mendorong akses pendidikan bagi warga miskin.

Secara global, pengembangan sekolah dengan pendekatan kerakyatan menjadi tren di negara-negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tinggi. Program seperti Community Schools di Amerika Serikat dan Public Learning Centres di Korea Selatan terbukti mampu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Dengan latar historis tersebut, program Sekolah Rakyat Baubau diharapkan tidak hanya menjadi pembangunan fisik, tetapi juga momentum untuk mendorong kualitas sumber daya manusia di daerah. Pemerintah menargetkan model sekolah ini dapat menjadi contoh penerapan pendidikan yang inklusif di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

Pembangunan Sekolah Rakyat juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan pendidikan jangka panjang untuk generasi muda. Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, proyek ini akan menjadi salah satu pembangunan pendidikan terbesar di Baubau dalam satu dekade terakhir.

Masyarakat pun berharap agenda ini dapat direalisasikan sesuai jadwal mengingat kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan terus meningkat. Dengan dimulainya pembangunan tahun ini, Baubau menapaki babak baru dalam pemerataan layanan pendidikan demi masa depan generasi berikutnya. (\*)

## Setahun Program CKG, Pemerintah Alihkan Fokus dari Deteksi ke Pengobatan Nyata



SEMARANG, BP-Pemerintah mengubah pendekatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) setelah satu tahun berjalan. Bila sebelumnya program ini menitikberatkan pada deteksi dini penyakit, kini fokus utamanya diarahkan pada pemberian pengobatan langsung kepada masyarakat yang teridentifikasi memiliki gangguan kesehatan.

Transformasi ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kunjungannya ke RSUD Dr. Kariadi Semarang pada Selasa (10/2/2026). "Cek kesehatan sekarang bukan hanya mengetahui kondisi, tetapi memastikan penyakitnya langsung ditangani," ujarnya.

Perubahan kebijakan tersebut menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menilai bahwa deteksi tanpa tindak lanjut pengobatan kerap membuat masyarakat tetap rentan terhadap komplikasi penyakit tidak menular.

Dalam pemaparannya, Menkes menekankan bahwa hipertensi dan diabetes dua penyakit paling sering ditemukan dalam program CKG merupakan "silent killer" yang sering muncul tanpa gejala awal. "Kalau tekanan darahnya tinggi, harus langsung diobati. Begitu juga gula darah," tegasnya.

Program CKG juga terus diperluas hingga ke sekolah, tempat

kerja, dan berbagai institusi. Di Semarang, pelaksanaan skala besar di lingkungan perusahaan bahkan mengantarkan pemerintah daerah dan RSUD dr. Kariadi meraih rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) setelah melakukan pemeriksaan di 53 perusahaan hanya dalam lima hari.

Perubahan strategi ini menempatkan Indonesia sejalan dengan tren global. Banyak negara "mulai dari Jepang hingga Inggris" mengalihkan fokus dari sistem kumulatif menuju deteksi dan intervensi dini berkelanjutan. Jepang, misalnya, sejak 2008 menerapkan "Specific Health Checks" yang menasar pencegahan diabetes dan obesitas melalui pemeriksaan rutin di tempat kerja.

Secara historis, Indonesia telah beberapa kali mendorong program pencegahan sejak era 1980-an melalui Posyandu, yang menjadi model kesehatan berbasis komunitas di Asia Tenggara. Namun, tantangan meningkatnya penyakit tidak menular membuat pemerintah kembali memperkuat pendekatan preventif dan kuratif sekaligus melalui CKG.

Di tingkat nasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat lebih dari 4,5 juta masyarakat telah mengikuti CKG sejak awal peluncurannya hingga tahun 2026. Angka itu menunjukkan peningkatan signifikan


dibandingkan tahun pertama implementasi, terutama karena perluasan cakupan layanan dan dukungan daerah.

Menkes menegaskan bahwa setiap warga, khususnya yang sudah memiliki faktor risiko, perlu mengikuti CKG minimal satu kali setiap tahun. "Kalau sudah punya darah tinggi atau gula, itu bukan pilihan lagi" itu kewajiban," kata Budi.

Ia juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu munculnya gejala berat sebelum memeriksakan diri. "Jangan tunggu sakit baru periksa. Sehat itu investasi, bukan beban," ujarnya, menekankan pentingnya intervensi cepat untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit kronis.

Pemerintah berharap pendekatan baru CKG dapat menekan beban ekonomi negara akibat penyakit tidak menular yang secara global menjadi penyebab 74 persen kematian menurut data WHO. Indonesia termasuk negara yang mulai terdampak lonjakan beban kesehatan tersebut dalam satu dekade terakhir.

Di akhir peninjauan, Menkes menyampaikan bahwa arah baru CKG dirancang untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terlambat mendapatkan penanganan medis. "Yang kita kejar adalah kepastian bahwa setiap orang benar-benar sehat, bukan hanya merasa sehat," tutupnya. (a1)

<p><b>PT FAREN GRAFIKA</b></p>  <p><b>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</b></p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA                  Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi                  Redpel: Prasctio                  Korlip: Firman                  Redaktur: Kasrun, Rahim                  Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval</p>	<p>Layouter: Ririn                  Pracetak: Aditya                  Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA                  Komisaris: Erna Agule                  Direktur Utama: Andina Latief                  Manager Keuangan: Nabila DAA                  Manager Iklan &amp; Pemasaran: Jamaluddin                  Kepala Sirkulasi: Robi                  Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman                  Kepala Biro Buton Utara: Kasrun                  Kepala Biro Buton: Rahim                  Kepala Biro Buton Selatan: Firman                  Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin                  Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin                  Agen Buton Selatan: Firman                  Agen Buton: Samrihan                  Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,                  Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01                  Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara                  Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01                  Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

## Cuaca Ekstrem, Makassar Alihkan Pembelajaran ke Sistem Daring 25-28 Februari



Laporan: Amran

MAKASSAR, BP-erintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memberlakukan pembelajaran daring selama empat hari bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP mulai 25 hingga 28 Februari 2026. Kebijakan ini ditetapkan sebagai langkah mitigasi menghadapi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Makassar sejak beberapa hari terakhir.

Penerapan belajar dari rumah tersebut dituangkan secara resmi dalam Surat Edaran Nomor 400.3.5/33/Disdik/II/2026. Surat edaran ini diterbitkan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV mengeluarkan peringatan dini terkait intensitas hujan yang berpotensi menimbulkan genangan dan banjir di kawasan perkotaan.

Kepala Disdik Makassar, Achi Soleman, menjelaskan bahwa keputusan pembelajaran daring diambil untuk memastikan keamanan war-

ga sekolah secara menyeluruh. "Kami harus memastikan keselamatan peserta didik dan guru. Cuaca ekstrem ini memiliki potensi risiko yang tidak bisa diabaikan," ujarnya saat, Rabu (25/2).

Dalam beberapa hari terakhir, curah hujan di wilayah Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi tersebut bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan lingkungan sekolah, terutama bagi peserta didik usia dini dan sekolah dasar. Achi menambahkan, "Kami tidak ingin ada insiden yang membahayakan siswa ataupun guru dalam perjalanan menuju sekolah."

Selain faktor keselamatan, kebijakan belajar dari rumah juga dipertimbangkan agar proses pembelajaran tetap berjalan tanpa gangguan. Achi memastikan bahwa semua guru tetap bertugas sesuai jadwal dan memberikan materi secara proporsional. "Pembelajaran harus tetap berlangsung. Guru akan memanfaatkan platform pem-

belajaran daring yang sudah biasa digunakan," ujarnya.

Disdik juga meminta siswa mengikuti proses belajar dari rumah dengan disiplin. Para orang tua diberi peran tambahan untuk mengawasi anak selama pembelajaran daring berlangsung. "Peran orang tua sangat membantu memastikan efektivitas pembelajaran selama masa cuaca ekstrem ini," kata Achi.

Kebijakan serupa dikenal pernah diterapkan di beberapa daerah Indonesia pada periode cuaca ekstrem 2020 dan 2022, termasuk banjir besar di Jabodetabek yang memaksa sekolah meniadakan pembelajaran tatap muka sementara. Secara global, pola kebijakan ini juga terlihat di Jepang dan Thailand yang kerap mengalihkan pembelajaran ke sistem daring ketika ancaman badai tropis meningkat.

Ahli mitigasi bencana pendidikan internasional mencatat bahwa pemanfaatan sistem belajar jarak jauh menjadi strategi efektif untuk menjaga

keberlangsungan pendidikan di tengah ancaman bencana alam. Langkah Makassar ini dinilai sejalan dengan praktik manajemen risiko yang diterapkan di banyak negara dengan tingkat curah hujan tinggi.

Fenomena hujan ekstrem sendiri merupakan bagian dari pola cuaca global yang dipengaruhi perubahan iklim. BMKG menyebut bahwa peningkatan intensitas hujan dalam dekade terakhir turut disebabkan oleh anomali suhu permukaan laut dan dinamika atmosfer regional.

Disdik Makassar berharap kebijakan pembelajaran daring sementara ini dapat melindungi warga sekolah sembari memastikan proses pendidikan tetap berjalan. Achi menegaskan bahwa kebijakan ini akan dievaluasi kembali apabila kondisi cuaca kembali stabil pada akhir Februari.

"Kami mengajak seluruh sekolah untuk menjalankan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan adalah prioritas utama," tutupnya. (\*)

## Pelajar Pengemudi Mobil Dinas BKAD Mamuju Ditetapkan Jadi Tersangka Kecelakaan



Ilustrasi. Pelajar tabrak warga pakai mobil dinas Pemda Mamuju.

Laporan: Hadi

MAKASSAR, BP-Kepolisian Resor Kota Mamuju resmi menetapkan pelajar berinisial FA (16) sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menimpa dua warga di Jalan Yos Sudarso. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik memastikan unsur kelalaian dan penggunaan kendaraan dinas tanpak.

Kasi Humas Polresta Mamuju, Iptu Herman Basir, membenarkan langkah hukum tersebut. "Iya, sudah jadi tersangka," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/2). Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan tetap berjalan sesuai ketentuan peradilan anak.

Insiden yang terjadi pada Jumat (6/2) sekitar pukul 01.00 WITA itu melibatkan mobil Toyota Fortuner hitam bernomor polisi DC 1156 A. Kendaraan tersebut merupakan mobil dinas milik ayah FA, Paharuddin, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada BKAD Mamuju. Mobil itu diduga melaju dalam kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali.

Kecelakaan berawal ketika FA, yang masih berstatus pelajar, mengemudikan mobil tersebut tanpa pendampingan orang dewasa. Ia hilang kendali dan menabrak sebuah warung serta dua warga yang berada di sekitar lokasi. Kedua korban kemudian dilarikan ke rumah sakit dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif.

Dalam penanganan perkara, penyidik tetap memperkirakan upaya diversi sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. "Jadi diversi, karena anak di bawah umur," kata Herman. Namun proses diversi itu sendiri bergantung pada kesediaan korban dan dinamika mediasi.

Upaya perdamaian telah ditempuh keluarga FA dengan menemui kedua korban. Namun hanya satu korban yang bersedia berdiskusi, sementara korban lainnya menolak. "Tuntutannya belum dapat disanggupi pihak keluarga," ungkap Herman. Korban meminta bantuan Rp100 juta, sementara keluarga tersangka baru mampu menyediakan Rp30 juta.

Meski tidak tercapai kesepakatan, Paharuddin disebut tetap berkomitmen memberikan dukungan pembiayaan kepada korban. "Walaupun tidak sepatutnya, tapi Pak Kabid akan tetap berikan uang bantuan biaya pengobatan," ujar Herman.

Kasus ini menambah daftar panjang kecelakaan yang melibatkan pengendara di bawah umur di Indonesia. Data Korlantas Polri pada 2023 mencatat sekitar 11 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan remaja usia 15-19 tahun, sebagian besar akibat kelalaian dan penggunaan kendaraan tanpa izin orang tua.

Secara internasional, laporan World

Health Organization (WHO) tahun 2023 menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian terbesar kedua pada kelompok usia 10-24 tahun di seluruh dunia. Faktor yang paling sering muncul ialah kecepatan berlebih, minimnya pengalaman mengemudi, serta penggunaan kendaraan tanpa pengawasan.

Kasus serupa juga pernah terjadi di Jepang pada 2017 ketika seorang remaja berusia 15 tahun mengendarai mobil keluarga tanpa izin dan menyebabkan tiga orang luka-luka. Pemerintah Jepang kemudian memperketat aturan kepemilikan kendaraan di rumah tangga berisiko tinggi.

Kepolisian memastikan proses hukum terhadap FA tetap berjalan meski terdapat peluang diversi. Penyidik juga terus menghimpun keterangan tambahan termasuk rekaman CCTV dan pemeriksaan terhadap saksi mata. Hasil penyidikan lanjutan akan menentukan langkah penuntutan berikutnya.

Sementara itu, kondisi kedua korban dilaporkan masih stabil. Tenaga medis menyebutkan bahwa salah satu korban mengalami patah tulang, sementara korban lain mengalami luka di bagian kepala. Keluarga korban berharap proses hukum berlangsung objektif dan memberikan rasa keadilan. (\*)

## Wali Kota Baubau HYF Tinjau Banjir Sawah, Pembenahan Irigasi Diprioritaskan, Pemkot Baubau Bergerak Cepat Atasi Pendangkalan dan Sumbatan Irigasi



**Pewarta: Amat Jr**

BAUBAU, BP -” Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya membenahi infrastruktur pengairan setelah banjir merendam persawahan di Kelurahan Waliabuku dan Ngkari-Ngkari, Kecamatan Bungi, pada Sabtu (21/2/2026). Tinjauan lapangan yang dilakukan pada Minggu (22/2/2026) mengonfirmasi bahwa penyumbatan saluran irigasi menjadi penyebab utama luapan air yang menggenangi lahan pertanian warga.

Banjir yang bertebaran dengan puncak musim hujan ini mengingatkan kembali pada sejumlah peristiwa serupa di daerah lain di Indonesia. Misalnya, banjir sawah di Jawa Tengah tahun 2023 yang menyebabkan ribuan hektare gagal panen, serta banjir besar di Pakistan pada 2022 yang berdampak luas pada produksi pangan nasional. Situasi itu menunjukkan pentingnya infrastruktur irigasi yang dikelola baik untuk menghadapi perubahan iklim global.

Dalam kunjungannya ke lokasi banjir, Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, yang didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau

Ibnu Wahid, ST, MM, Camat Bungi Hasrun, SIP, Kabag Protokoler, Lurah Waliabuku, dan Babinkantibmas, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kejadian ini terulang. “Kami ingin memastikan bahwa semua titik irigasi dari hulu hingga hilir benar-benar berfungsi optimal, tanpa hambatan apa pun,” ujarnya.

Berdasarkan hasil peninjauan, penyumbatan paling parah terjadi pada bagian hilir saluran. Tumpukan ranting kayu dan sampah yang menutup aliran air menyebabkan tingginya debit air yang tidak mampu ditampung oleh saluran irigasi yang telah mengalami pendangkalan. Informasi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) juga menyebutkan bahwa kapasitas saluran air tersebut telah berkurang secara signifikan.

“Pengerukan sedimen dan pembersihan material harus segera dikerjakan. Ini langkah penting agar air tidak meluap lagi ke sawah petani,” tambah Wali Kota. Ia menegaskan bahwa pembenahan irigasi bukan sekadar respons terhadap banjir kali ini, tetapi upaya jangka panjang menjaga ketahanan pangan lokal.

Di sisi lain, meskipun cukup luas area

yang tergenang, pemerintah memastikan bahwa kerugian petani masih dapat ditekan. Sebagian besar lahan diketahui baru memasuki masa tanam dan usia tanam pun masih sangat muda. Kondisi ini meminimalkan risiko terjadinya gagal panen, berbeda dengan kasus nasional pada 2010 ketika banjir mengakibatkan kerusakan tanaman padi siap panen di beberapa wilayah sentra beras.

“Petani kita masih berada pada fase awal tanam sehingga dampak banjir tidak terlalu berat. Namun, antisipasi tetap diperlukan,” jelas Kadis Pertanian Ibnu Wahid.

Sementara itu, Pemkot Baubau juga memastikan bahwa stok pangan daerah dalam kondisi aman. Dengan adanya panen beberapa bulan lalu, cadangan gabah masih mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Harga gabah di tingkat petani pun masih stabil, berada pada kisaran Rp12.000 per kilogram.

Kondisi harga yang stabil tersebut memberikan optimisme bagi pemerintah daerah bahwa kesejahteraan petani tetap terjaga. Situasi ini jauh berbeda dari gejolak harga gabah internasional

al pada 2008 yang menyebabkan krisis pangan global akibat gagal panen di beberapa negara produsen utama.

Camat Bungi Hasrun melaporkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan kelurahan dan Babinkantibmas untuk menggerakkan warga melakukan pembersihan ringan pada beberapa titik aliran yang dapat dijangkau. “Kami bergerak cepat agar aliran air kembali normal sambil menunggu penanganan teknis oleh pemerintah,” ujarnya.

Banjir kali ini juga menjadi momentum evaluasi bagi Pemkot Baubau untuk meningkatkan sistem mitigasi bencana berbasis komunitas. Pemerintah berencana mengintegrasikan pemetaan risiko banjir dengan data historis curah hujan serta kondisi irigasi agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat.

Upaya pembenahan irigasi diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan produksi pertanian Kota Baubau menghadapi perubahan iklim yang kian tidak menentu. (\*)

## Saung Ramadhan Lippo Plaza Baubau 2026 Resmi Dibuka Walikota H Yusran Fahim, UMKM Baubau Siap Geliat, Ekonomi Lokal Dipastikan Bergairah



**Laporan: Prasetyo M**

BAUBAU, Suasana area parkir Lippo Plaza Baubau berubah menjadi pusat perhatian warga Kota Baubau pada Jumat sore, 20 Februari 2026, saat pembukaan Saung Ramadhan Lippo Jilid VI berlangsung meriah. Ratusan warga, pelaku UMKM, dan undangan hadir menyaksikan peresmian agenda tahunan yang telah menjadi tradisi masyarakat kota tersebut.

Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, ini kembali menegaskan peran Saung Ramadhan sebagai ruang sosial yang menghidupkan nilai religius sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kegiatan yang telah memasuki tahun keenam. “Saung Ramadhan telah menjadi bukti bahwa kolaborasi dan kebersamaan mampu menghadirkan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Sejak pertama digelar, Saung Ramadhan Lippo dirancang untuk menjadi pusat aktivitas warga selama bulan suci. Kehadirannya memberikan peluang besar bagi UMKM untuk mempromosikan produk lokal, mulai dari kuliner khas Baubau hingga kerajinan tangan. Tahun ini, jumlah pelaku usaha yang terlibat meningkat seiring tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

Wali Kota Baubau menegaskan bahwa nilai sosial menjadi aspek terpenting dari event ini. Menurutnya, Saung Ramadhan bukan sekadar lokasi terbuka puasa, tetapi juga ruang perjumpaan yang memperkuat hubungan antarwarga. “Momen Ramadhan selalu menjadi saat yang tepat untuk mempererat silaturahmi,” kata Yusran dalam pidatonya.

Dalam kesempatan itu, Yusran juga menyoroti dampak positif kegiatan terhadap perekonomian lokal. Event musiman seperti Saung Ramadhan terbukti mampu menjadi katalisator perputaran ekonomi, terutama melalui peningkatan transaksi UMKM. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan serupa di berbagai kota di Indonesia dan negara-negara mayoritas Muslim juga memiliki peran serupa dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

Secara historis, kegiatan festival kuliner Ramadan telah berlangsung di berbagai negara. Di Timur Tengah misalnya, bazar Ramadan sudah menjadi tradisi sejak era Dinasti Abbasiyah, di mana pusat-pusat kota berubah menjadi lokasi perdagangan makanan khas Ramadan. Tradisi ini kemudian berkembang dan menginspirasi berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk menghadirkan kegiatan serupa yang menggabungkan unsur religius dan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, tradisi pasar Ramadan mulai populer sejak tahun 1980-an, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Makassar. Dari tahun ke tahun, kegiatan tersebut berkembang menjadi ruang interaksi sosial yang diikuti pedagang kecil hingga menengah. Hal itu pula yang kini tercermin dalam pelaksanaan Saung Ramadhan Lippo Jilid VI.

Pada tahun 2018, Kota Baubau mulai mengembangkan sentra kuliner musiman untuk mengakomodasi pedagang saat Ramadan. Upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi pemerintah kota dan pihak swasta, salah satunya Lippo Plaza Baubau yang sejak enam tahun lalu telah menjadi tuan rumah Saung Ramadhan. Kegiatan itu kemudian berkembang menjadi agenda yang dinanti

setiap Ramadan. Dalam sambutannya, Wali Kota juga mengimbau para pengunjung dan pedagang untuk menjaga ketertiban, kebersihan, serta keamanan selama kegiatan berlangsung. Ia berharap Saung Ramadhan dapat menunjukkan citra Kota Baubau sebagai kota yang religius dan ramah bagi pelaku usaha. “Mari kita tunjukkan bahwa Baubau mampu menyelenggarakan kegiatan yang tertib dan penuh nilai kebaikan,” tegasnya.

Sementara itu, para pelaku UMKM menyambut baik dibukanya event tersebut. Mereka menilai Saung Ramadhan memberikan ruang promosi yang efektif untuk memperluas pasar, sekaligus meningkatkan pendapatan musiman yang biasanya melonjak menjelang Idulfitri.

Pengunjung yang hadir tampak antusias menyambangi stan stan pedagang yang menawarkan beragam jenis makanan terbuka. Tidak sedikit dari mereka yang menyebutkan bahwa Saung Ramadhan sudah menjadi bagian dari agenda tahunan keluarga selama bulan puasa.

Dengan bertahannya kegiatan hingga jilid keenam, Saung Ramadhan Lippo dinilai telah memberikan kontribusi konkret pada pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Kehadiran kegiatan ini diharapkan terus menjadi wadah bagi peningkatan ekonomi lokal sekaligus mempererat kebersamaan warga Baubau.

Kegiatan pembukaan kemudian ditutup dengan peninjauan oleh Wali Kota dan jajaran pemerintah kota ke seluruh area bazar. Mereka menyapa para pedagang sekaligus memastikan kesiapan fasilitas penunjang bagi kenyamanan pengunjung selama Ramadan. (\*)